

Collaborative Governance: Model Kolaborasi Tata Kelola Pariwisata Bahari Meko Di Desa Peldo Kabupaten Flores Timur

Mikael Thomas Susu¹, Frans Bapa Tokan², Yosef Dionisius Lamawuran^{3*}

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira

³ Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira

Jln. Jend. Ahmad Yani 50-52, Kota Kupang, NTT, 85225, Indonesia

* Korespondensi Penulis. E-mail: dlamawuran@gmail.com, Telp: +62082141705392

Abstrak

Kawasan perairan Meko berpotensi menjadi objek wisata unggulan di Kabupaten Flores Timur. Namun ketersediaan infrastruktur dan fasilitas pendukung dinilai belum optimal karena sistem pengelolaan masih mengandalkan peran pemerintah Desa Pledo. Partisipasi kelompok kepentingan lain seperti pemerintah Kabupaten dan pihak swasta belum diorganisir secara maksimal. Tulisan ini bertujuan untuk menelisik faktor penghambat kolaborasi para pemangku kepentingan sekaligus menawarkan model kolaborasi ideal dalam tata kelola pariwisata Meko. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Masalah yang ditemukan dikaji menggunakan konsep *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash yang mencakup dialog tatap muka, membangun kepercayaan, pengembangan komitmen dan pemahaman bersama. Hasil penelitian menemukan bahwa *Collaborative Governance* menjadi model kolaborasi ideal bagi para pemangku kepentingan untuk mengurai permasalahan tata kelola sekaligus memberi signifikansi terhadap transformasi wilayah perairan Meko sebagai destinasi wisata unggulan.

Kata Kunci: *Collaborative Governance; Tata Kelola; Pariwisata; Meko.*

Collaborative Governance: A Model Of Collaboration In The Governance Of Meko Maritime Tourism In Peldo Village In East Flores District

Abstract

Meko water area has the opportunity to become a leading tourist attraction in East Flores Regency. However, the availability of infrastructure and supporting facilities is considered not optimal because the management system still relies on the role of the Pledo Village government. The participation of other interest groups such as the district government and the private sector has not been organized optimally. This paper aims to examine the factors inhibiting stakeholder collaboration while offering an ideal collaboration model in Meko tourism governance. This research uses a descriptive qualitative method with a case study approach. Data were collected through interview, observation and documentation techniques, then analyzed through data reduction, data presentation and conclusion drawing. The problems found were studied using the concept of Collaborative Governance from Ansell and Gash which includes face-to-face dialog, building trust, developing commitment and shared understanding. The results found that Collaborative Governance is an ideal collaboration model for stakeholders to unravel governance problems while giving significance to the transformation of the Meko water area as a leading tourist destination.

Keywords: *Collaborative Governance; Governance; Tourism; Meko.*



PENDAHULUAN

Pariwisata menjadi sektor paling efektif meningkatkan devisa Indonesia (Rahma, 2020). Data terbaru Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menunjukkan pendapatan devisa dari sektor pariwisata mencapai US\$4,26 miliar pada 2022 (Widi, 2022). Selain menjadi sektor industri prospektif bagi pendapatan negara, pariwisata juga menjadi *trigger* bagi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang serius mengerjakan industri pariwisata (Molan et al, 2022).

Pemerintah Kabupaten Flores Timur (Flotim) merupakan salah satu daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menetapkan sektor pariwisata sebagai prioritas pembangunan selain bidang pendidikan dan kesehatan. Dalam dimensi pengelolaan, pembangunan kepariwisataan Flores Timur lebih diarahkan pada pariwisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan (*tourism based community sustainable*), dengan menempatkan masyarakat sebagai subyek atau pelaku pariwisata bukan sebagai objek dalam konteks keberlanjutan. Landasan pengelolaan kepariwisataan diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (RIPKKA) Daerah Tahun 2013-2023. Pada regulasi dimaksud, pemerintah setempat menetapkan wilayah-wilayah yang dijadikan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata (KSP), yakni KSP Waiklibang, Larantuka, Sagu, Menanga dan Ritaebang (Disbudpar Flotim, 2013).

Kawasan pariwisata Meko di Desa Pledo Kecamatan Witihama yang merupakan bagian dari KSP Sagu,

menjadi salah satu potensi wisata yang sedang serius dikerjakan pemerintah desa Pledo sejak tahun 2018. Hal ini didasari oleh karakteristik dan potensi wisata kawasan pariwisata Meko serta berpedoman pada hasil riset *World Wide Fund for Nature-Indonesia* (WWF-Indonesia, 2017) yang menegaskan bahwa perairan Meko dapat dimanfaatkan sebagai zona pariwisata unggulan karena memiliki potensi wisata dan keterwakilan sumber daya penting seperti pasir timbul, ekosistem mangrove, keterwakilan ekosistem terumbu karang tepi (*fringing reef*) serta habitat penting bagi dua jenis ikan hiu seperti hiu sirip hitam atau *blacktip reef shark* dan hiu sirip putih atau *whitetip reef shark* (WWF, 2017). Selain itu, momentum yang perlu dijaga oleh pemerintah setempat adalah keberhasilan atraksi pasir timbul Meko menjadi juara ke-2 destinasi wisata air terpopuler di ajang Anugerah Pesona Indonesia (API) tahun 2020.

Meski memiliki potensi wisata unggulan, namun pengelolaan kawasan perairan Meko dihadapkan pada sejumlah persoalan. Riset WWF-Indonesia menjelaskan bahwa tingkat kesadaran dan pengetahuan penduduk lokal dalam melestarikan biofisik lingkungan pesisir (karang, stok ikan, pencemaran dan erosi pantai) masih terbilang rendah dan masih minimnya pemberdayaan ekonomi, lemahnya pengawasan, pembinaan dan penegakan hukum yang menyebabkan eksploitasi ekosistem pesisir dan laut serta tindakan destruktif marak terjadi.

Atraksi wisata bahari Meko juga belum didukung dengan infrastruktur dan fasilitas pendukung seperti air



bersih, listrik, jaringan internet dan penginapan. Sistem tata kelola pun dilakukan dengan metode konvensional melalui kelompok sadar pariwisata (Pokdarwis) dan belum didukung dengan SDM yang profesional dalam bidang pariwisata. Kondisi eksisting Meko sesungguhnya merupakan akibat dari terpusatnya pengelolaan yang masih mengandalkan peran terpusat dari pemerintah Desa Pledo. Minimnya partisipasi dan peran dari kelompok lain seperti pemerintah Kabupaten Flores Timur maupun pihak swasta diduga menjadi pemicu terhambatnya pembangunan dan pengelolaan kawasan wisata Bahari Meko. Akumulasi dari sejumlah persoalan tersebut menyebabkan para wisatawan lokal seringkali memberikan kritik ketika berkunjung, begitu juga wisatawan asing yang memilih menikmati keindahan Meko dari kapal pesiar mereka, ketimbang harus turun ke daerah daratan.

Umumnya daerah wisata dikelola oleh pemerintah, namun ketika kebutuhan wisatawan akan pelayanan semakin meningkat, tuntutan tersebut sering tidak diimbangi dengan usaha dari pemerintah itu sendiri. Diperlukan peran dan partisipasi dari pelaku dan pemangku kepentingan pariwisata lain seperti masyarakat, pihak swasta, *Non Government Organization* (NGO), kelompok akademisi dan media (Andhita et al., 2020). Dalam studi administrasi publik, kerjasama antar pemangku kepentingan dikenal dengan istilah *collaborative governance* (Ansell & Gash, 2007; M. H. U. Dewi, 2013). Konsep ini diartikan sebagai upaya melibatkan secara langsung peran dari pemangku kepentingan selain pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik yang berorientasi pada konsensus dan

deliberatif (Ansell & Gash, 2007; Astuti, 2020). Dengan demikian *collaborative governance* menjadi alternatif dalam meningkatkan kualitas tata kelola pariwisata dengan memanfaatkan peran dari pemangku kepentingan di luar pemerintah (Matthoriq et al., 2021).

Penelitian tentang *collaborative governance* sudah banyak dilakukan untuk menganalisis tata kelola pariwisata alam (Bela & Utama, 2022); pariwisata bahari (Rasyid & Darumurti, 2022) dan agrowisata (Surya, 2021). Sedangkan riset tentang tata kelola pariwisata berbasis *collaborative governance* di NTT baru dilakukan untuk mengkaji pariwisata budaya di Kabupaten Ngada (Seka et al., 2022)

Meski demikian, penelitian sebelumnya cenderung menggunakan konsep *collaborative governance* Ansell dan Gash secara parsial dalam menganalisis kolaborasi pemerintah, swasta dan masyarakat dalam tata kelola pariwisata, sehingga aspek kajiannya sebatas pada siklus kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif dan desain kelembagaan, tanpa mengulas siklus proses kolaboratif secara utuh. Kajian lain difokuskan pada kolaborasi untuk produktivitas, informasi, legitimasi dan sumber daya seperti pikiran Donahue dan Zeckhauser (Seka et al., 2022).

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, paper ini didesain dengan menggunakan konsep *collaborative governance* dari Ansell dan Gash secara utuh mulai kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan dan proses kolaboratif yang mencakup dialog tatap muka, membangun kepercayaan, pengembangan komitmen dan pemahaman bersama. Dengan demikian studi ini bertujuan untuk menelisik faktor penghambat kolaborasi yang berdampak terhadap masalah tata kelola



sekaligus menawarkan kolaborasi ideal untuk akselerasi pembangunan dan pengembangan kawasan wisata bahari Meko. Secara khusus, penelitian ini fokus mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut ini: bagaimana mekanisme tata kelola wisata bahari Meko? siapa saja kelompok kepentingan yang terlibat? apa saja masalah yang dihadapi? apa model kolaborasi ideal dalam tata kelola wisata bahari Meko?

Secara teoritis, temuan penelitian ini berguna bagi pengembangan konsep *Collaborative Governance* dalam studi Administrasi Publik.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis permasalahan tata kelola kawasan wisata Bahari Meko di Desa Pledo Kecamatan Wilihama Kabupaten Flores Timur. Pendekatan studi kasus diartikan sebagai penelitian intensif yang mengkaji satu kasus tertentu atau lebih ataupun sebuah keputusan tertentu atau lebih dengan melibatkan berbagai macam data baik wawancara, dokumentasi, dokumen, rekaman audio-visual guna mendapatkan jawaban secara utuh dari sebuah kasus yang menjadi fokus peneliti (Creswell, 2007; Herdiana, 2023; Lamawuran et al., 2023)

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (*indepth interview*). Wawancara dilakukan terhadap beberapa informan dari pemangku kepentingan pariwisata seperti pemerintah Kabupaten Flores Timur, WWF-Indonesia, pemerintah Desa Pledo, masyarakat Dusun III Meko, pemilik lahan, pelaku usaha pariwisata

dan pengunjung. Selain wawancara mendalam, pengambilan data dibuat juga melalui pengamatan terlibat (*participatory observation*). Guna memperkaya analisis, kajian ini tidak hanya menggunakan data primer dari lapangan (*field study*) tetapi juga data sekunder melalui studi kepustakaan atas jurnal, dan media massa yang sesuai dengan tema penelitian. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Wisata Bahari Meko

Kawasan wisata bahari Meko terintegrasi dalam wilayah Dusun III Meko yang secara administratif merupakan bagian dari Desa Pledo Kecamatan Wilihama Kabupaten Flotim. Letaknya berada di bagian tenggara pulau Adonara dan terpisah dari wilayah desa induk dengan rentang jarak ± 9 km. Wilayah ini dihuni oleh etnis Bajo yang eksodus dari daerah Sulawesi dan telah menetap sejak tahun 1989.

Perkembangan Meko sebagai salah satu destinasi wisata bahari unggulan di Flotim oleh karena kekayaan sumber daya alam (*natural resources*) yang dimiliki. Hasil identifikasi WWF-Indonesia bersama pemerintah desa Pledo dan masyarakat setempat, menunjukkan jika kawasan perairan Meko dapat dimanfaatkan sebagai zona pariwisata unggulan karena memiliki potensi wisata seperti pasir timbul, keterwakilan sumber daya penting berupa: ekosistem mangrove, keterwakilan ekosistem terumbu karang



tepi (*fringing reef*) dan menjadi habitat penting bagi dua jenis ikan hiu seperti hiu sirip hitam atau *blacktip reef shark* dan hiu sirip putih atau *whitetip reef shark* (WWF-Indonesia, 2017). Identifikasi tersebut menunjukkan wilayah Meko memiliki 14 objek daya tarik wisata (ODTW).

Tabel 1. Daftar Nama ODTW Desa Pledo

NO	OBJEK WISATA	JENIS WISATA	LOKASI
1	Pulau Pasir Putih	Wisata Pantai	Dusun III
2	Pulau Watan Peni Kecil	Wisata Pantai	Dusun III
3	Pulau Watu Peni Besar	Wisata Pantai	Dusun III
4	Pulau Karang Buko	Snorkeling	Perairan Meko
5	Bungeng Madikki	Berenang	Perairan Meko
6	Toroh Ana Sikeroang	Diving	Perairan Meko
7	Pulau Kroko	Habitat Kelelawar & Hutan Mangrove	Dusun III
8	Pam'pa	Diving, Habitat Hiu dan Biota laut	Perairan Meko
9	Sunang	Diving, Habitat Hiu dan Biota laut	Perairan Meko
10	Lao Kubor 2	Diving, Habitat Hiu dan Biota laut	Perairan Meko
11	Puteh Toroh 1	Diving, Habitat Hiu dan Biota laut	Perairan Meko
12	Puteh Toroh 2	Berenang dan Snorkling	Perairan Meko
13	Palekko	Snorkeling	Perairan Meko

14	Lao Kubor 1	Diving, Habitat Hiu dan Biota laut	Perairan Meko
----	-------------	------------------------------------	---------------

Sumber: Profil Pariwisata Desa Pledo (2021)

Daya tarik utama dari wisata bahari Meko adalah pulau pasir timbul atau pasir putih. Objek wisata ini meraih juara ke-2 kategori destinasi wisata air terpopuler di ajang Anugerah Pesona Indonesia (API) tahun 2020, sekaligus menjadi pemicu utama kunjungan para wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Dari tahun 2017-2023 total wisatawan domestik yang berkunjung adalah 11.623 orang sedangkan wisatawan mancanegara sebanyak 118 orang. Pada tahun 2020 dan 2021 baik wisatawan domestik dan mancanegara tidak berkunjung karena ada larangan selama masa Pandemi COVID-19. Jumlah wisatawan baik domestik dan mancanegara terus meningkat hingga tahun 2023.

Tabel 2. Daftar Wisatawan Pengunjung

WISATAWAN	TAHUN							
	DOMESTIK	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			260	3.331	3.412	-	-	3.713
MANCA NEGARA	45	23	32	-	-	35	85	
TOTAL	305	3.354	3.444	-	-	3.748	3.895	

Sumber: Profil Pariwisata Desa Pledo (2023).



Keterlibatan dan Peran *Stakeholder*

Riset ini menemukan bahwa transformasi Meko menjadi destinasi wisata tidak lepas dari keterlibatan dan peran beberapa *stakeholder* sebagaimana yang diuraikan berikut ini.

Pihak pertama adalah pemilik tanah ulayat kawasan wisata Bahari Meko. Hasil penelusuran dan wawancara, diketahui bahwa kawasan wisata bahari Meko merupakan milik dari suku Lamabelawa (Kole) yang berdomisili di Kecamatan Witihama. Alih waris suku Lamabelawa (Kole), menjelaskan kawasan wisata Meko merupakan bagian dari tanah ulayat sehingga segala aktivitas yang berlangsung di kawasan tersebut harus berdasarkan izin dari mereka. Berkenaan dengan atraksi wisata Meko, peran pemilik ulayat terlihat sejak memberikan izin kepada WWF-Indonesia ketika melakukan survei ekologi pengembangan kawasan konservasi pada tahun 2017. Hasil rekomendasi WWF-Indonesia menjadi dasar bagi pihak ahli waris untuk memberikan mandat kepada pemerintah Desa Pledo untuk mengelola daerah perairan Meko menjadi destinasi wisata. Izin pengelolaan diberikan dengan tujuan untuk membantu peningkatan ekonomi lokal dan pendapatan asli desa. Meski demikian pemerintah Desa Pledo tidak diberikan kewenangan untuk membangun kemitraan dengan pihak manapun dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan Meko. Izin pengelolaan diberikan kepada Pemdes Pledo dengan adanya kompensasi berupa pembagian hasil retribusi, dimana pihak ahli waris mendapatkan

bagian sebesar 30%, pemerintah desa Pledo 30% dan Pokdarwis 40%.

Stakeholder kedua adalah WWF-Indonesia. Berkembangnya atraksi wisata bahari Meko tidak lepas dari peran penting WWF-Indonesia yang melakukan survei ekologi pengembangan kawasan konservasi pada tahun 2017. Temuan *survey* memberikan afirmasi akan potensi perairan Meko yang menjadi habitat penting bagi dua jenis hiu langka, yakni hiu sirip hitam (*blacktip reef shark*) dan hiu sirip putih (*whitetip reef shark*). Kontribusi WWF-Indonesia dalam pengembangan wisata Meko bahari sebenarnya sebagai upaya mitigasi kelestarian biota laut dan kawasan pesisir dari tindakan ekstraktif yang marak dilakukan nelayan. Langkah pengembangan dimulai dengan identifikasi potensi objek wisata bersama pemerintah desa dan masyarakat. Selanjutnya memberikan pendampingan dan edukasi ihwal tata kelola pariwisata dan membentuk organisasi pengelola yang diberi nama Bangkit Muda Mudi Mekko (BM3). WWF-Indonesia juga mendorong pemerintah desa untuk penerbitan Perdes tentang pengembangan ekowisata bahari. Berkat peran dan kontribusi WWF-Indonesia, atraksi pulau pasir putih atau pasir timbul Meko ramai dikunjungi oleh wisatawan hingga sekarang.

Pemerintah desa Pledo menjadi *stakeholder* sekaligus menjadi pengelola wisata bahari Meko. Keseriusan pemerintah desa Pledo diwujudkan dengan menerbitkan Perdes Nomor 6 tahun 2019 tentang Pengembangan Ekowisata Bahari dan Perdes nomor 7 tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Usaha.



Implementasi Perdes nomor 6 tahun 2019 berdampak terhadap Alokasi APBDes tahun 2019 senilai Rp. 142.755.380 untuk pembangunan sarana akomodasi berupa rumah singgah dan alokasi APBDes tahun 2020 sebesar Rp. 14.495.000 untuk penataan dan pemeliharaan lokasi wisata juga untuk mendanai kegiatan pemberdayaan dan pelatihan kelompok sadar pariwisata (Pokdarwis). Sedangkan penerapan Perdes nomor 7 tahun 2020 berdampak terhadap PADes Pledo, di mana pada tahun 2020 total pendapatan sebesar adalah Rp. 3.500.000, tahun 2021 sejumlah Rp. 4.6500.000, tahun 2022 senilai Rp. 5.312.000 dan tahun 2023 berjumlah Rp. 5.567.450. Total PADes Pledo dari wisata bahari Mekko sebesar Rp. 13.462.000.

Selanjutnya adalah kelompok sadar pariwisata (Pokdarwis) Meko. Mulanya organisasi ini dibentuk oleh WWF-Indonesia tahun 2017 dengan nama Bangkit Muda Mudi Mekko (BM3). Kemudian pada tahun 2018 berubah menjadi Pokdarwis atas instruksi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur. Secara kelembagaan, Pokdarwis Meko berada dibawah tanggung jawab pemerintah desa Pledo. Tugas dan fungsi Pokdarwis Meko adalah menyediakan jasa transportasi laut menuju pulau pasir putih dan menarik retribusi jasa usaha sesuai Perdes Nomor 7 Tahun 2019.

Pihak terakhir yang turut berperan adalah pemerintah Kabupaten Flotim. Keterlibatan Pemda Flotim terwakili dari peran instansi teknis mulai dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud), Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Dinas Perhubungan (Dishub). Disparbud berperan mendirikan fasilitas pendukung berupa satu unit pos

informasi dan satu unit toilet umum, menggunakan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2018 senilai Rp. 400.000.000. Ditahun yang sama, Disparbud Flotim turut memberi andil dengan membentuk kelompok sadar pariwisata (Pokdarwis) Meko dan melibatkan anggota organisasi ini dalam dua kali pelatihan manajemen pengelolaan destinasi wisata, yakni pada tahun 2020 dan 2021. Dinas Pekerjaan Umum juga turut berkontribusi dengan mengerjakan peningkatan ruas jalan raya sepanjang 2,5 km. Sedangkan Dinas Perhubungan turut membantu dengan membangun jembatan tambatan perahu (JTP) pada tahun 2019.

Status Lahan, Jalan Buntu Kolaborasi Dan Masalah Tata Kelola

Seperti yang telah diulas sebelumnya, kawasan wisata Meko berada di atas tanah ulayat suku Lamabelawa (Kole). Menurut informasi dari tokoh masyarakat setempat, tanah ulayat suku Lamabelawa tidak dapat diperjualbelikan untuk urusan apapun, apalagi untuk kepentingan bisnis.

Persoalan status lahan dinilai sebagai faktor penghambat dari proses kolaborasi para aktor dalam tata kelola wisata bahari Meko. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flotim menjelaskan bahwa sejauh ini dukungan peningkatan pembangunan di Meko menggunakan anggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU). Intensifikasi pembangunan menggunakan pagu Dana Alokasi Khusus (DAK) pariwisata di Meko, belum bisa direalisasikan selama kawasan pariwisata Meko belum menjadi aset milik Pemda Flotim.

Para pelaku usaha pariwisata lokal turut membenarkan bahwa status lahan yang masih dikuasai oleh pihak alih waris menjadi alasan mengapa pihak



investor belum mau berinvestasi. Sebagai objek wisata yang baru berkembang, Meko membutuhkan intervensi pembangunan dengan modal anggaran yang besar. Dan selama belum ada kejelasan ihwal status lahan, maka pihak investor manapun enggan untuk berinvestasi.

Menyikapi polemik ini, pihak alih waris menjelaskan bahwa sebenarnya ada solusi yang ditawarkan kepada Pemda Flotim dan beberapa investor dari Jakarta dan Singapura, yakni dengan sistem sewa atau kontrak. Langkah ini dipandang sebagai solusi yang ideal bagi semua aktor. Namun hingga saat ini, tawaran tersebut belum mendapatkan jawaban dari pemerintah Kabupaten maupun dari pihak swasta.

Minimnya investasi dari Pemda Flotim dan pihak swasta, berdampak terhadap perkembangan pariwisata Meko. Riset ini menemukan ada banyak permasalahan yang muncul di Meko, mulai dari ketersediaan infrastruktur dan fasilitas pendukung, manajemen pengelolaan, kualitas SDM pengelola dan tindakan perusakan lingkungan. Peneliti menemukan jika atraksi wisata Meko belum didukung dengan infrastruktur umum (*general infrastructures*) semisal: jalan, air, listrik, jaringan seluler dan internet. Fasilitas penunjang semisal: *resort*, area *food court*, pusat perbelanjaan dan souvenir, klinik kesehatan, fasilitas *diving* dan *snorkeling*, toilet dan tempat sampah memadai, serta area parkir juga belum tersedia. Selain itu, akses transportasi dan jasa angkutan terpadu juga belum tersedia. Bagi wisatawan lokal di Adonara, umumnya menggunakan transportasi pribadi seperti mobil dan sepeda motor menuju

Meko. Sedangkan bagi wisatawan di luar pulau Adonara, misalnya dari Larantuka dan Lewoleba, belum disediakan jasa angkutan terpadu bagi wisatawan, baik angkutan darat maupun laut. Kondisi ini turut berpengaruh terhadap jumlah kunjungan wisatawan dari luar pulau Adonara.

Temuan lainnya adalah sistem pengelolaan pariwisata belum dilakukan secara profesional. Pengelola belum mengintegrasikan 14 objek daya tarik wisata dalam satu model pemasaran terpadu. Belum ada promosi yang dilakukan secara sistematis dengan melibatkan peran dari pihak travel dan hotel *agent*. Hasilnya tingkat penerimaan retribusi pariwisata selama empat tahun terakhir belum linear dengan alokasi anggaran pembangunan. Buruknya manajemen pengelolaan teramati juga dari sistem pembayaran retribusi masuk lokasi wisata yang masih dilakukan secara tunai. Mekanisme pembayaran secara tunai seharusnya dihindari karena rentan terhadap manipulasi pelaporan.

Riset ini juga menemukan bahwa tenaga kerja yang ada hanyalah anggota Pokdarwis yang bertugas sebagai penarik retribusi dan ojek laut. Ketiadaan aktivitas administrasi perkantoran, mengakibatkan pos informasi dan rumah singgah belum difungsikan. Selain itu kawasan wisata bahari ini belum memiliki pekerja (*employment*) seperti pramuwisata (*guide*), instruktur selam (*dive instructor*), penjaga pantai (*lifeguard*), petugas kebersihan (*cleaning service*) dan petugas keamanan (*security*). Kasus lain yang turut dirangkul adalah praktik *illegal fishing* dan tindakan ekstraksi

nelayan masih marak dilakukan. Persoalan ini belum bisa diselesaikan karena penanganannya harus melibatkan peran Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Flotim bersama Korps Kepolisian Air dan Udara (Korpolairud) setempat.

Ragam permasalahan tersebut tidak hanya berdampak terhadap kenyamanan wisatawan domestik tapi juga wisatawan mancanegara. Selama ini para turis asing cenderung mengeksploitasi keindahan perairan Meko hanya dari kapal pesiar (*cruise ship*), tanpa berkunjung ke wilayah daratan. Akibatnya penarikan retribusi pariwisata jarang diberlakukan kepada para wisatawan mancanegara.

Collaborative Governance Sebagai Model Kolaborasi Ideal

Collaborative governance adalah salah satu konsep dalam ilmu administrasi publik yang menjadi fokus dari para peneliti di beberapa dekade terakhir. Konsep *collaborative governance* hadir sebagai kritik terhadap praktek administrasi publik dalam paradigma *New Public Management* (NPM) yang lebih mengutamakan efisiensi dan menjadikan masyarakat sebatas objek dari kebijakan publik (N. L. Y. Dewi, 2019). Konsep *collaborative governance* merupakan bagian dari upaya demokratisasi studi administrasi publik dengan tujuan untuk melibatkan masyarakat dan kelompok *civil society* dalam proses perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan publik (Subarsono, 2011; Astuti, 2020).

Terminologi *collaborative governance* bermakna cara pengelolaan pemerintahan yang turut melibatkan pemangku kepentingan diluar institusi pemerintahan, berorientasi pada konsensus dan mengutamakan musyawarah dalam proses pengambilan

keputusan sehingga keputusan yang dihasilkan bersifat kolektif dalam menjalankan kebijakan publik melalui program dan kegiatan strategis (Ansell & Gash, 2007; Astuti, 2020). Di era global, pemerintah tidak dapat menjadi aktor tunggal yang memonopoli penyelenggaraan pemerintahan. Dibutuhkan keterlibatan aktor lain diluar pemerintah untuk melengkapi keterbatasan dari pemerintah. Robertson dan Choi menjelaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik setidaknya melibatkan tiga aktor kunci yakni pemerintah, swasta dan masyarakat (Dwiyanto, 2018; Rasyid & Darumurti, 2022).

Di beberapa negara, konsep *collaborative governance* dapat menyelesaikan problematika publik yang berkaitan dengan isu lingkungan, keamanan, kemiskinan, kesehatan, yang mana proses kolaborasi perlu melibatkan *stakeholder* di luar organisasi pemerintah (Sufianti et al., 2013).

Di Indonesia, konsep *collaborative governance* turut digunakan untuk mengurai banyak persoalan publik, salah satunya pariwisata (Ali et al., 2018). Pengelolaan pariwisata awalnya didominasi oleh instansi pemerintah. Namun meningkatnya tuntutan akan layanan pariwisata, partisipasi dari masyarakat dan swasta sangat dibutuhkan untuk menjaga tingkat kepuasan dan kepercayaan dari para wisatawan. Keterlibatan dari masyarakat dan swasta dalam pengelolaan pariwisata merupakan bagian dari implementasi paradigma *New Public Governance* sekaligus menjadi alternatif dalam upaya intensifikasi dan akselerasi tata kelola pariwisata (Ansell & Gash, 2007; Iman Surya, 2021)



Meski demikian kolaborasi para aktor acap kali menemui tantangan yang berujung pada gagalnya proses kolaborasi. Hambatan proses kolaborasi biasanya disebabkan oleh tiga faktor, yakni: faktor budaya, institusi dan politik (Heritz, 2017; Astuti, 2020). Faktor budaya yang dimaksud adalah budaya ketergantungan prosedur dan tidak berani untuk mengambil tindakan dan terobosan untuk menghadapi resiko dari kolaborasi. Faktor institusi karena sering kali institusi-institusi yang terlibat dalam kolaborasi (pemerintah) cenderung menerapkan struktur hirarkis dan sistem administrasi yang berbelit-belit terhadap kelompok lain yang terlibat dalam proses kolaborasi. Sedangkan faktor politik turut berpengaruh karena kurangnya inovasi dari para pemimpin dalam mencapai tujuan-tujuan politik yang kompleks dan kontradiktif.

Dengan demikian kolaborasi para aktor dalam penyelesaian masalah publik, perlu dilakukan dengan pemilihan model kolaborasi kontekstual dengan permasalahan yang dihadapi. Salah satu model kolaborasi yang kerap digunakan dalam penanganan tata kelola pariwisata adalah *collaborative governance* yang digagas oleh Ansell dan Gash. Konsep ini menekankan siklus kolaborasi secara rinci menggunakan empat parameter yang sistematis yakni kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif dan proses kolaboratif yang mencakup dialog tatap muka, membangun kepercayaan, pengembangan komitmen dan pemahaman bersama.

a. Kondisi Awal

Kondisi awal dalam proses *collaborative governance* adalah kondisi

yang mempengaruhi sebelum kolaborasi dilaksanakan dan bisa berupa kondisi penghambat maupun pendukung kolaborasi. Ada tiga hal yang mempengaruhi terbentuknya kondisi awal yakni ketidakseimbangan antara pengaruh/kekuatan, sumber daya, pengetahuan pemangku kepentingan; sejarah di masa lalu yang terjadi baik berupa kerjasama yang telah dilakukan sebelumnya ataupun konflik yang pernah terjadi diantara pemangku kepentingan; dan bentuk dorongan serta kendala yang mempengaruhi partisipasi dalam kolaborasi (Astuti, 2020).

Potensi sumber daya perairan Meko berpeluang menjadi objek wisata unggulan. Hal ini tentu menjadi kekuatan yang dapat mempengaruhi partisipasi para aktor dalam kolaborasi. Namun fakta lapangan menunjukkan bahwa proses kolaborasi menemui jalan buntu karena adanya konflik kepentingan antar para aktor. Seting kondisi awal perlu ditinjau kembali dengan proses deliberasi kewenangan secara proporsional sehingga setiap *stakeholder* dapat merealisasikan target yang akan dicapai bersama. Hal ini sejalan dengan penelitian lain yang menyebutkan bahwa kondisi awal dapat menjadi pemicu bagi para pihak yang terlibat untuk melakukan kolaborasi yang efektif baik dari pemerintah maupun kelompok lainnya (Nurul Aulia Ridwan & Supri Hartono, 2023)

b. Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan berkaitan dengan adanya aturan yang dipakai sebagai dasar dalam kolaborasi. Penerapan peraturan dalam kolaborasi perlu dilakukan secara transparan, mengedepankan prinsip musyawarah



dalam proses penentuan dan mengutamakan prinsip keadilan dalam pelaksanaannya (Astuti, 2020).

Kemunculan wisata bahari Meko pada awal hingga pengelolaan saat ini, telah melibatkan beberapa aktor seperti WWF-Indonesia, pihak alih waris, Pemdes Pledo, Pemda Flotim dan Pokdarwis. Sedangkan pihak swasta menjadi kelompok kepentingan yang belum dilibatkan.

Meski demikian, desain kelembagaan para aktor belum terorganisir dan berdampak terhadap model partisipasi para aktor yang bersifat insidental. Desain kelembagaan menjadi agenda lanjutan yang segera dilakukan dalam tata kelola pariwisata Meko, sehingga ada regulasi yang dirumuskan untuk melegitimasi proses kolaborasi para pihak. Nantinya kesepakatan yang dihasilkan perlu dituangkan dalam dokumen formal dan perlu dijalankan secara adil dan transparan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keyakinan bagi masing-masing pihak bahwa setiap musyawarah dan negosiasi adalah nyata demi mencapai tujuan dari proses kolaborasi (Redha & Hilman, 2024).

c. Kepemimpinan Fasilitatif

Kepemimpinan menjadi variabel penting untuk menentukan keberhasilan para aktor dalam proses kolaborasi dengan membangun rasa saling percaya agar tidak terjadi konflik atau perselisihan (Greenwood et al., 2021; Redha & Hilman, 2024). Kepemimpinan fasilitatif adalah kepemimpinan yang sanggup memfasilitasi seluruh aktor untuk mau duduk bersama di meja perundingan, bertatap muka, membangun sikap saling percaya (*trust*), komitmen, menyusun rencana strategis, *road map*, visi misi dan tujuan bersama yang disepakati secara konsensus

(Ansell & Gash, 2007; Nurul Aulia Ridwan & Supri Hartono, 2023).

Berkaitan dengan penelitian ini, keberhasilan dalam desain kelembagaan, perlu ditindaklanjuti dengan membentuk struktur kelembagaan untuk menentukan model kepemimpinan fasilitatif. Perbedaan pandangan antar aktor dan adanya sikap tidak percaya, memerlukan intervensi *leadership* yang kuat dalam manajemen kelembagaan sehingga visi, misi dan tujuan dari pembangunan dan pengembangan tata kelola wisata Meko dapat diimplementasikan melalui program dan kegiatan yang kontekstual dengan kemampuan sumber daya (alam, manusia dan materi) yang dimiliki.

Mekanisme pengambilan keputusan perlu disiasati dengan mengedepan nilai musyawarah sehingga keputusan yang dihasilkan tidak mendiskriminasikan aspirasi kelompok tertentu (Agranoff & McGuire, 1998; Astuti, 2020; Crosby et al., 2017).

d. Proses Kolaborasi

Ansell dan Gash menjelaskan bahwa keberhasilan tiga siklus kolaborasi sebelumnya sangat menentukan sikap dari pemangku kepentingan untuk menentukan pilihan dalam kolaborasi (Ansell & Gash, 2007).

Tahapan proses kolaborasi diawali dengan dialog tatap muka (*face to face dialog*) antara pemangku kepentingan yang terlibat dalam menyikapi permasalahan publik. Dialog tatap muka dimaksudkan untuk menciptakan kesempatan bagi mereka untuk saling berkomunikasi, menyatakan pandangan, dan mengidentifikasi isu-isu utama yang perlu disikapi bersama (Ansell dan Gash, 2007; Maulia dan Setiyono (2023). Dialog dibutuhkan untuk mengidentifikasi peluang dengan mengedepankan narasi bahwa semua



pihak yang terlibat dalam kolaborasi akan diuntungkan sekaligus menjadi sebuah cara untuk memecah kecurigaan antar aktor dan mencegah eksplorasi keuntungan bersama di tahap awal sebuah kolaborasi (Astuti, 2020).

Dialog tatap muka sangat dibutuhkan untuk mempertemukan para aktor baik dari masyarakat, pemerintah maupun pihak swasta agar polemik status lahan dapat diselesaikan dengan menghasilkan jalan tengah yang bersifat *win-win solution* tanpa merugikan pihak manapun. Keputusan dari pihak alih waris yang memberikan akses pengelolaan dengan sistem sewa atau kontrak, semestinya dapat dihormati oleh Pemda Flotim sebab hal ini merupakan bagian dari upaya untuk melestarikan nilai adat yang diyakini masyarakat setempat. Lagi pula dimensi kebijakan pengembangan pariwisata Kabupaten Flores Timur dilakukan berbasis kemasyarakatan. Model kesepakatan yang ditawarkan oleh pemilik ulayat sesungguhnya menjadi input yang positif kepada pemerintah daerah dalam rangka melindungi aset-aset pariwisata potensial dari praktek akuisisi para investor. Fenomena jual-beli tanah di Labuan Bajo yang berdampak terhadap hilangnya akses pengelolaan tanah oleh masyarakat lokal, menjadi pelajaran yang patut diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

Proses berikutnya adalah membangun kepercayaan (*trust building*). Kolaborasi dalam tata kelola pariwisata menghadirkan konsekuensi berupa kontribusi dari para *stakeholders* dan hal ini tidak akan mudah terlaksana bilamana masing-masing pihak menaruh

rasa curiga maupun dugaan negatif di antara mereka (Ardiansyah et al., 2023).

Dalam tata kelola pariwisata Meko, para aktor tentunya telah dan akan memberikan kontribusi baik yang bernilai tradisi maupun ekonomis. Situasi ini berpotensi memunculkan sikap saling curiga dari para aktor, sebab dengan kontribusi yang ada tentunya masing-masing pihak tidak ingin dirugikan atau dieksploitasi. Oleh karenanya diperlukan penguatan bangunan kepercayaan agar para pihak bersedia melakukan tata kelola pariwisata yang kolaboratif.

Bangunan kepercayaan sangat ditentukan oleh keberhasilan mereka dalam merumuskan kesepakatan pada forum dialog tatap muka. Terciptanya rasa saling percaya memberi jaminan investasi dan kontribusi para aktor, sekaligus memudahkan proses distribusi kewenangan dan tanggung jawab mereka dalam proses tata kelola pariwisata Meko. Rasa saling percaya tidak bisa diukur hanya dengan kesepakatan verbal tapi membutuhkan saluran lain dengan menuangkan kesepakatan bersama dalam dokumen perjanjian kerjasama resmi (Nurul Aulia Ridwan & Supri Hartono, 2023; Redha & Hilman, 2024). Selanjutnya sikap saling percaya perlu dibuktikan dengan komitmen dari masing-masing pihak untuk menghormati kesepakatan yang ada sehingga tidak ada ruang kecurigaan dalam tata kelola di masa mendatang.

Proses selanjutnya adalah pengembangan komitmen (*commitment to process*). Komitmen para elit menjadi variabel kritis dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan dari proses kolaborasi (Kurniawan et al., 2024).



Bentuk komitmen dapat dilihat melalui sikap para pemangku kepentingan dalam menjalankan kesepakatan bersama untuk mewujudkan tujuan dari kolaborasi (Redha & Hilman, 2024).

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, keberhasilan dalam mencari jalan keluar terhadap masalah status lahan, selanjutnya membutuhkan komitmen dari para pemangku kepentingan, diantaranya dengan memberikan deliberasi kewenangan pengelolaan wisata Meko kepada pihak-pihak yang berkompeten. Meskipun tidak mudah, tapi komitmen untuk menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama, dapat menghilangkan kecurigaan, melegitimasi kepercayaan sekaligus membentuk persepsi bersama bahwa bentuk dan nilai kontribusi mereka tidak akan terbuang sia-sia.

Tahap terakhir adalah pemahaman bersama (*share understanding*). Proses kolaborasi para pemangku kepentingan harus dapat membangun kesepahaman bersama tentang apa yang ingin dicapai secara kolektif (Ansell & Gash, 2007; Priono & Rusli, 2023). Bentuk pemahaman bersama dalam kolaborasi berupa tujuan bersama, definisi masalah yang dihadapi dan pemahaman bersama mengenai nilai yang akan dicapai dalam berkolaborasi (Ansell & Gash, 2007; Danastry & Kurniawan, 2021).

Gagalnya kolaborasi lintas sektoral dalam tata kelola pariwisata Meko sebelumnya, terjadi karena masing-masing pihak belum mengetahui pentingnya suatu kolaborasi. Hal ini berimplikasi terhadap minimnya fasilitas dan prasarana pendukung atraksi wisata Meko. Dengan demikian, kolaborasi pemahaman bersama diharapkan dapat membantu para aktor untuk merumuskan tujuan kolaborasi, memetakan masalah yang terjadi di

Meko serta menghormati nilai kolaborasi yang akan dijalankan bersama. Proses ini tidak saja memberi dampak jangka pendek, tapi bila dilakukan secara terstruktur akan berguna bagi tata kelola pariwisata Meko berkelanjutan. Dengan begitu tujuan untuk menjadikan Meko sebagai destinasi wisata unggulan di Kabupaten Flores Timur akan tercapai.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Gagalnya kolaborasi para pemangku kepentingan dalam tata kelola wisata bahari Meko disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti tidak ada pihak yang tampil sebagai inisiator kolaborasi, polemik status lahan dan sikap saling curiga dari para pemangku kepentingan.

Tata kelola wisata bahari Meko membutuhkan kolaborasi dari para pemangku kepentingan baik yang sudah terlibat maupun yang belum. Konsep *collaborative governance* dari Ansell dan Gash dengan empat parameter yakni kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif dan proses kolaboratif (dialog tatap muka, membangun kepercayaan, pengembangan komitmen dan pemahaman bersama), dapat menjadi model kolaborasi ideal bagi para pemangku kepentingan.

Karakteristik konsep *collaborative governance* menjadi instrumen yang relevan dalam mengurai permasalahan dalam tata kelola wisata bahari Meko. Konsep ini juga memberikan pengaruh determinan untuk meningkatkan intensifikasi pembangunan dan manajemen pengelolaan yang prima demi mewujudkan kawasan perairan Meko sebagai objek wisata unggulan di Kabuapten Flores Timur, yang nantinya akan berdampak terhadap peningkatan



kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah.

Saran

Penelitian ini mempunyai saran, berikut: *Pertama*, kepada pemerintah Desa Pledo, pemerintah Kabupaten Flores Timur, Pokdarwis dan pemilik ulayat, agar segera mengorganisir proses kolaborasi menggunakan konsep *collaborative governance* dari Ansel dan Gash yang mencakup kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif dan proses kolaboratif (dialog tatap muka, membangun kepercayaan, pengembangan komitmen dan pemahaman bersama), dapat dijadikan sebagai model kolaborasi oleh para pemangku kepentingan dalam tata kelola wisata bahari Meko.

Kedua, pihak swasta adalah kelompok kepentingan lain yang perlu untuk dilibatkan dalam proses kolaborasi guna melengkapi kelembagaan aktor kolaborasi yang ada.

Ketiga, kepada peneliti selanjutnya untuk mengevaluasi pelaksanaan kolaborasi para aktor berdasarkan konsep *collaborative governance* dari Ansell dan Gash. Tujuannya untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dari konsep tersebut, sekaligus menawarkan pendekatan-pendekatan teoritis lainnya dalam tata kelola wisata bahari Meko di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Agranoff, R., & Mcguire, M. (1998). Multinetwork Management: Collaboration And The Hollow State In Local Economic Policy. *Journal Of Public Administration Research And*

Theory, 8(1), 67-91. <https://doi.org/10.1093/Oxfordjournals.Jpart.A024374>

Ali, M., Amil, A., & Zuhadi, Z. (2018). Implementasi Kebijakan Collaborative Governance Dalam Tata Kelola Kawasan Pariwisata Pada Badan Promosi Daerah Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Ulul Albab*, 22(2). <https://doi.org/10.31764/Jua.V22i1.579>

Andhita, C., Kirana, D., & Artisa, R. A. (2020). *Pengembangan Desa Wisata Berbasis Collaborative Governance Di Kota Batu* (Vol. 6, Issue 1). *Jurnal Administrasi Publik*.

Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance In Theory And Practice. *Journal Of Public Administration Research And Theory*, 18(4), 543-571. [https://doi.org/10.1093/jopart/18\(4\)543](https://doi.org/10.1093/jopart/18(4)543)

Ardiansyah, F. W., Purnaweni, H., & Priyadi, B. P. (2023). Analisis Collaborative Governance Dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 12(3).

Astuti, R. W. H. R. A. (2020). *Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik* (Tim DAP Press (Ed.); 1st Ed.). Universitas Diponegoro Press.

Bela, H. S., & Utama, A. S. (2022). Model Collaborative Governance Dalam Pembangunan Pariwisata Alam Di Kecamatan Ulu Ogan Kabupaten Ogan Komering Ulu. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(4).



- <https://doi.org/10.36982/jpg.v7i4.2461>
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry And Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Sage Publications.
- Crosby, B. C., 'T Hart, P., & Torfing, J. (2017). Public Value Creation Through Collaborative Innovation. *Public Management Review*, 19(5), 655-669.
<https://doi.org/10.1080/14719037.2016.1192165>
- Danastry, A. G., & Kurniawan, T. (2021). Tata Kelola Kolaboratif Pada Penetrasi Jaringan Fixed Broadband Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 7(2), 158-163.
- Dewi, M. H. U. (2013). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali. *Jurnal Kawistara*, 3(2).
<https://doi.org/10.22146/kawistara.3976>
- Dewi, N. L. Y. (2019). Dinamika Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(2), 2581-2424.
- Dwiyanto, A. (2018). *Ilmu Administrasi Publik Di Indonesia, Mencari Identitas*. Gadjah Mada University Press.
- Greenwood, S., Singer, L., & Willis, W. (2021). *Collaborative Governance*. Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781003172062>
- Herdiana, D. (2023). Sumedang Puseur Budaya Sunda: Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Budaya Lokal. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 11(1), 69-82.
- <https://doi.org/10.34010/agregasi.v11i1.5779>
- Heritz, J. (2017). The Multiplying Nodes Of Indigenous Self-Government And Public Administration. *Canadian Public Administration*, 60(2), 289-292.
<https://doi.org/10.1111/capa.12214>
- Iman Surya, S. N. H. A. S. N. N. (2021). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Wisata Berkelanjutan Di Kabupaten Kulon Progo (Studi Kasus: Wisata Kebun Teh Nglingga). *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 6(2), 190-199.
- Kurniawan, I. A., Machrunnisa, & Firna, N. A. (2024). Collaborative Governance Dalam Pelaksanaan Program Kampung Iklim Di Kampung Sirih Kelurahan Mekarsari Kota Tangerang. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 13-21.
- Lamawuran, Y. D., Tokan, F. B., & Ratumakin, P. A. K. . (2023). Tradisi Bu'a Oring: Alternatif Penanganan Stunting Berbasis Kearifan Lokal Di Kabupaten Flores Timur. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 11(2), 112-128.
<https://doi.org/10.34010/agregasi.v11i2.11228>
- Matthoriq, M., Zauhar, S., & Hermawan, R. (2021). Collaborative Governance Dalam Tata Kelola Pariwisata-Desa (Studi Pariwisata-Desa "Bumiaji Agrotourism" Di Kota Wisata Batu). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 007(01), 20-29.
<https://doi.org/10.21776/Ub.Jiap.2021.007.01.3>
- Nurul Aulia Ridwan, & Supri Hartono. (2023). Collaborative Governance Program Sinau Bareng Untuk Mengatasi Kekerasan Kepada Anak



- Di Kelurahan Kandangan Surabaya. *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa*, 1(6), 149–156. <https://doi.org/10.54066/jikma.v1i6.1075>
- Priono, S., & Rusli, Z. (2023). Pengembangan Wisata Kampung Bandar Berbasis Collaborative Governance Oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Pekanbaru. *Jurnalpendidikantambusai*, 7(2), 16011–16017.
- Rahma, A. A. (2020). Potensi Sumber Daya Alam Dalam Mengembangkan Sektor Pariwisata Di Indonesia. *Jurnal Nasional Pariwisata*, 12(1), 1. <https://doi.org/10.22146/jnp.52178>
- Rasyid, K., & Darumurti, A. (2022). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Obyek Wisata Bahari Wilayah Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020-2021. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 3(2), 75–91. <https://doi.org/10.18196/jpk.v3i2.13476>
- Redha, M. R. M., & Hilman, Y. A. (2024). Jurnal Agregasi: Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi. *Jurnal Agregasi: Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 12(1), 37–54.
- Seka, F. M. S., Juanda, & Labolo, M. (2022). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Pariwisata Budaya Di Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Visioner*, 14(2), 97–106.
- Simon, K., & Molan, H. (2022). Cultural Tourism Policy Network In Lewokluok Village, East Flores Regency. *Jurnal Pubbis*, 6(2), 127. <https://doi.org/10.35722/pubbis.v6i2.640>
- Subarsono. (2011). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, Dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Sufianti, E., Sawitri, D., Pribadi, K. N., & Firman, T. (2013). Proses Kolaboratif Dalam Perencanaan Berbasis Komunikasi Pada Masyarakat Nonkolaboratif. *MIMBAR*, 29(2), 133–144.
- Surya, I. (2021). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Wisata Berkelanjutan Di Kabupaten Kulon Progo (Studi Kasus: Wisata Kebun Teh Nglingsgo). *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 6, 190–199.
- Widi, S. (2022, December 28). *Pendapatan Devisa Pariwisata Indonesia Melejit Pada 2022*. DataIndonesia.Id.
- WWF-Indonesia. (2017). *KONSERVASI HIU WWF-Indonesia*.
- WWF-Indonesia. (2019, September 13). *Desa Pledo Dorong Perlindungan Hiu Melalui Regulasi Desa*. WWF-Indonesia.

PROFIL SINGKAT

Drs. Mikael T. Susu, M.Si adalah dosen tetap Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Drs. Frans Bapat Tokan, MA adalah dosen tetap Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Yosef D. Lamawuran, S.Sos, M.Si adalah dosen tetap Program Studi





Administrasi Publik, FISIP
Universitas Katolik Widya Mandira
Kupang.

